

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam perekonomian Indonesia, Badan Usaha Milik Negara memegang peranan yang cukup penting sebagai pelaku utama dalam perekonomian nasional. Dilihat dari perkembangannya setiap tahun, BUMN telah memberikan andil dalam menopang keuangan negara dan melayani peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hampir setiap warga Negara membutuhkan produksi dari BUMN, dengan keanekaragaman sektor usaha yang dimilikinya (Wahyudin Z.(2008:2). Oleh karena itu, peningkatan kinerja BUMN merupakan hal yang diharapkan oleh publik agar tercipta kepercayaan untuk melakukan investasi maupun transaksi keuangan lainnya. Namun, sejak terjadinya krisis moneter yang berkepanjangan tahun 1997, pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik menjadi isu yang mengemuka di Indonesia. Semenjak itulah semua pihak sepakat Indonesia harus mulai dengan tata kelola pemerintah, perusahaan pemerintah, dan swasta. Berbagai upaya memperbaiki tata kelola dilakukan dengan menerapkan prinsip GCG di semua lini masyarakat (Wahyudin Z.(2008:1). Penelitian Thomas S. (2006:1), menyebutkan dari berbagai hasil pengkajian yang dilakukan oleh berbagai lembaga riset independen nasional dan internasional, krisis moneter tersebut menunjukkan rendahnya pemahaman terhadap arti penting dan strategisnya penerapan prinsip-prinsip GCG oleh pelaku bisnis di Indonesia.

Tujuan perusahaan dalam mengamankan aset dan menyehatkan pengelolaan BUMN, penerapan GCG merupakan alternatif penting yang diharapkan mampu mengatasi berbagai masalah inkonsistensi akibat benturan kepentingan antara-antara pihak-pihak yang terkait. Cheung dan Chan (2004) dalam Dian Sita A., tata kelola perusahaan mengacu pada sistem dimana perilaku manusia dipantau dan dikendalikan. Pentingnya tata kelola suatu perusahaan dikarenakan dalam perusahaan besar di perekonomian modern berhubungan dengan banyak pihak yang menyediakan modal (*shareholders*) dan pihak yang mengatur sumber daya (manajemen). Konflik kepentingan antara dua kelompok ini muncul dan memungkinkan adanya pengambilan hak-hak pemegang saham.

Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada BUMN di Indonesia, dirancang untuk menciptakan sistem pengelolaan dan pengawasan berlandaskan pada prinsip efisiensi dan produktivitas guna meningkatkan kinerja dan nilai BUMN, serta menghindarkan BUMN dari tindakan-tindakan pengeksploitasian di luar asas tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Sampai dengan akhir tahun 2002 lalu, Lembaga Kementrian Negara BUMN mengawasi kinerja ratusan BUMN yang memiliki total aset senilai Rp 942 triliun (Syamsul Ashar, 2003). Berikut ini terdapat diagram batang yang dapat menggambarkan perkembangan kinerja BUMN dari tahun 2009-2011:

Gambar 1.1
Diagram Batang Kinerja BUMN

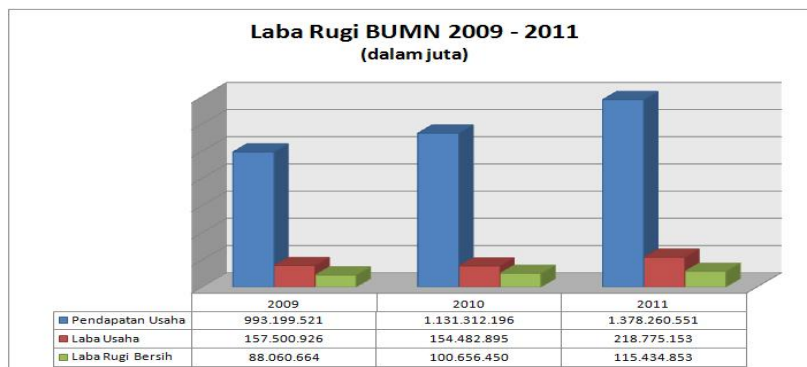
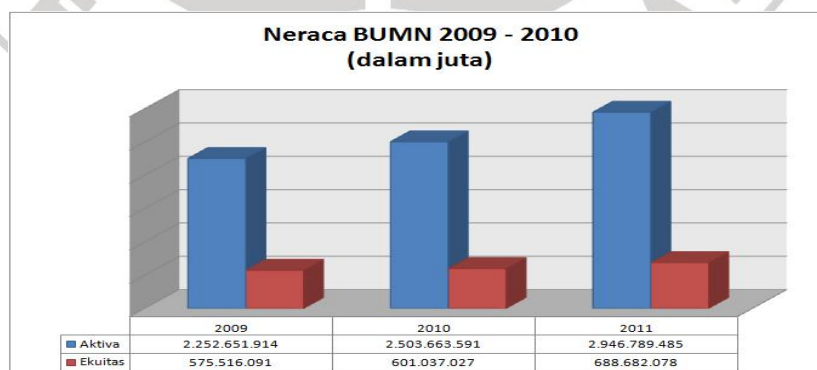


Diagram ini menunjukkan perkembangan BUMN saat ini dari tahun 2009-2011. Diagram ini diambil dari situs resmi bumn pada 26 Mei 2013. Dilihat dari pendapatan usaha, terjadi peningkatan dari tahun 2009-2010 sebesar Rp.138.112.675, dan tahun 2010-2011 meningkat sebesar Rp.246.948.355. Laba usaha mengalami penurunan dari 2009-2010 sebesar Rp. 3.018.031 dan pada tahun 2010-2011 mengalami peningkatan sebesar Rp. 64.292.258. Laba bersih BUMN mengalami peningkatan pada tahun 2009-2010 sebesar Rp. 12.595.786 dan tahun 2010-2011 sebesar Rp. 14.778.403.

Gambar 1.2
Diagram Batang Kinerja BUMN



Sumber: *bumn.go.id*

Gambar 1.2 menunjukkan peningkatan jumlah aktiva dan ekuitas yang dimiliki oleh BUMN di Indonesia. Pada tahun 2009-2010 terjadi peningkatan jumlah aktiva yang ada pada BUMN dilihat dari laporan neraca sebesar Rp. 251.011.677 dan tahun 2010-2011 sebesar Rp. 443.125.894. Jumlah ekuitas yang dimiliki BUMN pun meningkat pada tahun 2009-2010 sebesar Rp. 25.520.936 dan tahun 2010-2011 sebesar Rp. 87.645.051.

Selain diagram yang menunjukkan perkembangan kinerja BUMN dari tahun 2009-2011, terdapat fenomena terkait penerapan prinsip GCG pada BUMN yang dikutip dari situs resmi masing-masing BUMN dan situs bisnis keuangan kompas pada tahun 2010-2011 (*bisniskeuangan.kompas.com*, diakses tanggal 11 Oktober 2013), menunjukkan perkembangan yang cukup baik atas penerapan prinsip-prinsip GCG pada BUMN dilihat dari perolehan skor pada penilaian GCG yang dilakukan oleh BPKP. Penilaian ini berdasarkan kriteria yang telah diatur oleh Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada BUMN di Indonesia yaitu hak dan tanggung jawab pemegang saham, kebijakan perusahaan mengenai penerapan GCG, penerapan GCG, pengungkapan informasi, dan komitmen perusahaan. Adapun skor yang diraih masing-masing BUMN atas penilaian (*assessment*) pelaksanaan GCG saat ini oleh BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan) pada tahun 2010-2011 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Skor Penilaian GCG

No	Nama BUMN	Skor
1	PT Telkom	>70
2	PT LEN	75,32
3	PT Inti	72
4	PT Pindad	<70
5	PT KAI	79,30
6	PT Pos Indonesia	73,96
7	PT Dirgantara Indonesia	<70
8	PT PN VIII	76,55
9	PT Bio Farma	86,68

Sumber: website resmi masing-masing BUMN dan *bisniskeuangan.kompas.com* (diakses 26 Agustus 2013)

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa hampir seluruh BUMN yang berkantor pusat di Bandung, seperti PT Telkom, PT LEN, PT INTI, PT KAI, PT Pos Indonesia, PT Perkebunan Nusantara VIII, dan PT Bio Farma telah melaksanakan GCG dengan baik dilihat skor atas penilaian yang didapat dengan penilaian >70 telah melaksanakan GCG dengan baik dan < 70 telah melaksanakan GCG dengan cukup baik. Selain itu, terdapat pula BUMN yang mendapatkan hasil <70 dengan penilaian cukup baik yaitu PT Pindad dan PT Dirgantara Indonesia, sehingga diperlukan adanya komitmen dari Direksi dan Dewan Komisaris untuk menerapkan prinsip-prinsip GCG sekaligus pelaksanaan kebijakan itu bersifat *top down*, serta tercermin dalam setiap proses pengambilan keputusan yang mengedepankan kepentingan perusahaan dan pemangku kepentingan.

Selain itu, adapun fenomena yang dikutip dari *vivanews* pada tahun 2013 (*bisnis.news.viva.co.id* diakses tanggal 11 Oktober 2013) menunjukkan bahwa terdapat 14 perusahaan BUMN yang memiliki skor terbaik dalam penerapan *Good Corporate Governance*. Penilaian ini dilakukan oleh *Indonesian Institute for*

Corporate Directorship (IICD) yang mengacu pada *ASEAN Corporate Governance Scorecard* yang sudah mulai diterapkan untuk perusahaan-perusahaan terbuka di kawasan ASEAN menjelang integrasi pada 2015. Dari hasil penilaian ini diantaranya PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk sebagai salah satu BUMN yang berkantor pusat di Bandung yang mendapatkan peringkat sepuluh terbaik sebagai BUMN yang menerapkan GCG dengan sangat baik. Seperti yang dikutip dari situs bisnis keuangan kompas pada tahun 2010 (*bisniskeuangan.kompas.com* diakses tanggal 11 Oktober 2013), terdapat 16 BUMN bidang usaha Pertambangan, Industri Strategis, Energi, dan Telekomunikasi (PISET) yang telah melaksanakan prinsip-prinsip GCG dilihat dari kelengkapan infrastruktur penerapan GCG dan berkomitmen dalam melaksanakan prinsip-prinsip GCG diantaranya, terdiri dari BUMN yang berkantor pusat di Bandung yaitu PT Telkom, PT Inti, PT Pindad, PT KAI, dan PT LEN Industri.

Seperti yang dikutip dari situs resmi PT Telkom pada tahun 2013 (*telkom.co.id* diakses tanggal 11 Oktober 2013) dalam melakukan penugasan audit internal, PT Telkom senantiasa berpedoman pada standar profesi internal audit internasional yaitu *The International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing* yang dikeluarkan oleh *Institute Internal Auditor* (IIA) untuk membantu manajemen dalam mengawasi pengelolaan perusahaan. Selain itu, untuk memelihara dan meningkatkan kinerja auditor internal, perusahaan berupaya untuk memberikan pelatihan-pelatihan, seminar, dan mengikutsertakan auditor internal dalam pembelajaran berkelanjutan yang bersertifikasi. Adapun

fenomena terkait dengan pelaksanaan audit internal pada BUMN yang berkantor pusat di Bandung yang dikutip dari situs resmi PT Pos Indonesia pada tahun 2013 (*posindonesia.co.id* diakses tanggal 11 Oktober 2013) bahwa penugasan audit internal yang dilakukan oleh unit Satuan Pengawas Internal membantu direksi untuk melakukan pengujian secara periodik atas penerapan prinsip-prinsip GCG dan efektifitas operasional perusahaan melalui penilaian yang independen.

Fenomena yang telah dipaparkan tersebut, menunjukkan bahwa pelaksanaan audit internal pada suatu perusahaan memberikan kontribusi bagi aktivitas pengelolaan bisnis perusahaan itu sendiri. Sesuai peran audit internal sebagai pemberi jaminan (*assurance*) dan layanan konsultasi, auditor internal membantu direksi dalam mengawasi pengelolaan perusahaan. Peningkatan peran serta audit internal dilakukan dengan cara meningkatkan kualitas *assurance* atas operasional perusahaan. Audit internal dilakukan untuk memastikan bahwa risiko-risiko bisnis yang mungkin terjadi dapat segera diatasi melalui pengendalian internal yang efektif. Jika ditemukan ketidakefektifan pada pengendalian suatu proses bisnis atau risiko yang di luar kendali, maka dilakukan pengujian lebih lanjut objek audit guna mendalami akar permasalahannya. Dalam Buku *Good Corporate Governance*, Wahyudin Z., (2008:14), Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal Indonesia (KOPAI) berkeyakinan bahwa fungsi audit internal (satuan pengendalian internal) yang efektif mampu menawarkan sumbangan penting dalam meningkatkan proses *corporate governance*, pengelolaan risiko, dan pengendalian. Fungsi audit internal biasanya dilakukan bukan dengan tujuan menguji kelayakan laporan keuangan, akan tetapi untuk membantu pihak

manajemen dalam mengidentifikasi kelemahan-kelemahan, kegagalan-kegagalan, dan inefisiensi dari berbagai program yang telah direncanakan oleh perusahaan. Menurut Daniri dalam Ika Kurnia A. (2011:4), *internal audit* merupakan bagian dari praktik *Good corporate governance* (GCG) dan praktik manajemen, dimana didalamnya mencakup pengawasan yang memadai, etika bisnis, independensi, pengungkapan yang akurat dan tepat waktu, akuntabilitas dari seluruh pihak yang terlibat dalam proses pengelolaan perusahaan, serta mekanisme untuk memastikan adanya tindak lanjut yang seksama jika terjadi pelanggaran dalam perusahaan. Seperti penelitian Dedi Kusmayadi (2012), audit internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap *corporate governance*. Penelitian Misya Kurnia Lahu (2011) menjelaskan peranan audit internal berpengaruh positif signifikan terhadap *Good Corporate Governance* pada PT Kimia Farma, Tbk Jakarta. Penelitian Maylia Pramono Sari dan Raharja (2011), terdapat pengaruh yang signifikan antara peran auditor internal terhadap *Good Corporate Governance* (GCG) pada entitas berstatus Badan Layanan Umum (BLU). Penelitian Thomas S. Kaihatu (2006), pelaksanaan *Corporate Governance* di Indonesia masih sangat rendah, hal ini terutama disebabkan oleh kenyataan bahwa perusahaan-perusahaan di Indonesia belum sepenuhnya memiliki *Corporate Culture* sebagai inti dari *Corporate Governance*. Penelitian Dian Sita Aryanti (2012), PT Wijaya Karya, Tbk. telah melaksanakan GCG dengan baik. Penelitian Ika Kurnia Aryani dan Sudarmo (2011), menjelaskan internal audit berpengaruh positif terhadap penerapan *good corporate governance*.

Uraian di atas menunjukkan pentingnya proses audit internal yang efektif dalam membantu perusahaan mengidentifikasi kelemahan-kelemahan dan inefisiensi program yang direncanakan oleh perusahaan serta meningkatkan proses *corporate governance*. Penelitian ini mengacu pada penelitian Dedi Kusmayadi (2012), *Determinasi Audit Internal dalam Mewujudkan Good Corporate Governance Serta Implikasinya pada Kinerja Bank*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pada penelitian ini penulis meneliti tentang audit internal (X), *Good Corporate Governance* (Y) karena penulis menganggap variabel ini yang paling mempengaruhi terhadap kelangsungan hidup BUMN di tengah persaingan bisnis yang ketat. Selain itu, tempat penelitian yang berbeda dari penelitian terdahulu, penulis memilih BUMN sebagai tempat penelitiannya karena BUMN memegang peranan yang signifikan dan berpengaruh terhadap kinerja perekonomian nasional. Berbeda dengan peneliti sebelumnya yang memilih tempat penelitiannya pada perusahaan perbankan di Tasikmalaya yang penilaian GCG nya berbeda dengan penilaian GCG pada BUMN. Atas dasar latar belakang penelitian inilah penulis tertarik untuk meneliti *Pengaruh Pelaksanaan Audit Internal Terhadap Penerapan Good Corporate Governance (Sudit pada BUMN yang Berkantor Pusat di Bandung)*.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan audit internal pada BUMN yang berkantor pusat di Bandung?
2. Bagaimana penerapan *Good Corporate Governance* pada BUMN yang berkantor pusat di Bandung?
3. Bagaimana pengaruh pelaksanaan audit internal terhadap penerapan *Good Corporate Governance* pada BUMN yang berkantor pusat di Bandung?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini yaitu untuk mengkaji dan mendapat gambaran mengenai pengaruh antara pelaksanaan audit internal terhadap penerapan GCG pada BUMN yang berkantor pusat di Bandung. Selain itu peneliti ingin mengetahui bagaimana peran pelaksanaan audit internal dan penerapan GCG pada BUMN yang berkantor pusat di Bandung.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan audit internal BUMN yang berkantor pusat di Bandung.
- b. untuk mengetahui bagaimana penerapan *Good Corporate Governance* pada BUMN yang berkantor pusat di Bandung saat ini.

- c. untuk mengetahui adanya pengaruh antara pelaksanaan audit internal terhadap penerapan *Good Corporate Governance* pada BUMN yang berkantor pusat di Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan audit internal dan penerapan *Good Corporate Governance* BUMN serta pengaruh peranan audit internal terhadap penerapan *Good Corporate Governance* pada BUMN yang berkantor pusat di Bandung. Penelitian ini juga dapat dijadikan referensi untuk penelitian berikutnya dalam bidang yang sama.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan pengetahuan mengenai peran pelaksanaan audit internal dalam membantu perusahaan mengindikasikan inefisiensi program yang direncanakan perusahaan dan melakukan evaluasi program kerja perusahaan sehingga dapat mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik dan sehat. Penelitian ini juga dapat menjadi acuan dan masukan untuk perusahaan dalam menerapkan tata kelola perusahaan yang baik.